

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang, dalam proses perkembangan ini, negara menghadapi berbagai tantangan, terutama masalah kemiskinan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama pemerintah yang artinya bahwa perkembangan ekonomi (*economic development*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output ekonomi suatu negara dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, dan kapasitas produksi (Gombar, 2025). Sementara itu, perkembangan ekonomi mencakup aspek yang lebih luas, termasuk peningkatan kualitas hidup, pemerataan pendapatan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Sen. A, 2021).

Negara maju umumnya fokus pada pertumbuhan ekonomi karena sudah memiliki fondasi pembangunan yang kuat, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia lebih menekankan perkembangan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan (World Bank, 2020). Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil (rata-rata 5% per tahun sebelum pandemi Covid-19) (BPS, 2023). Namun, kemiskinan masih menjadi masalah utama. Pada Maret 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 25,9 juta orang (9,36% populasi) hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 2023). Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia adalah ketimpangan ekonomi, akses terbatasnya Pendidikan dan kesehatan, tingginya pengangguran dan lapangan kerja informal, dan dampak pandemic.

Dalam kenyataannya, negara berkembang perlu memberi perhatian lebih pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena UMKM memiliki potensi dan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Seperti penelitian (Adityaswara, 2021) mengatakan bahwa menurut data Badan Pusat Statistik, sector UMKM menyumbang kurang lebih 60% dari Produk Domestik Bruto. Akan tetapi, jika dilihat dari data perbankan, kredit UMKM hanya berjumlah sekitar Rp. 1.000.000.000.000,- atau 205 dari kredit perbankan. Banyak

perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan, namun hanya industri kecil yang mampu bertahan dalam krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh bisnis mereka yang pada dasarnya mengandalkan bahan baku lokal, bukan impor.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, sehingga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, keberlangsungan dan perkembangan UMKM menjadi perhatian utama berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan dan institusi lainnya.

Namun, akses terhadap pembiayaan masih menjadi kendala utama yang menghambat pertumbuhan UMKM. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan mendapatkan modal dari perbankan konvensional karena persyaratan agunan yang ketat dan ketiadaan laporan keuangan yang memadai. Di sinilah peran lembaga keuangan syariah seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi penting, dengan menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel berbasis prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) serta jual beli (murabahah).

Pembiayaan syariah melalui BPRS menawarkan solusi alternatif dengan skema yang lebih adil dan berorientasi pada kemitraan, bukan sekadar utang-piutang. Skema bagi hasil, misalnya, memungkinkan risiko usaha ditanggung bersama antara bank dan nasabah, sehingga mengurangi beban pelaku UMKM. Namun, efektivitas pembiayaan ini masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap produk syariah, panjangnya prosedur pencairan dana, dan keterbatasan jaringan BPRS yang belum menjangkau daerah-daerah terpencil.

Untuk memperkuat peran UMKM dalam penanggulangan kemiskinan, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha. Pemerintah perlu memperluas pendampingan teknis kepada UMKM dalam pengelolaan keuangan dan akses pasar, sementara BPRS harus meningkatkan inovasi produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro. Selain itu, edukasi tentang keuangan syariah harus digencarkan agar UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan secara optimal tanpa takut terjebak dalam praktik riba.

Dengan kolaborasi ini, UMKM tidak hanya akan menjadi penyangga ekonomi nasional di masa krisis, tetapi juga motor penggerak perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan. Keterbatasan akses ke sumber dana sering kali menjadi hambatan bagi pengembangan dan ekspansi usaha mereka. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya agunan yang memadai, rendahnya literasi keuangan, serta kurangnya kepercayaan dari pihak perbankan terhadap kapasitas pengelolaan keuangan UMKM. Dalam konteks ini, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) muncul sebagai salah satu solusi yang menawarkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) HIK Parahyangan, sebagai lembaga keuangan syariah, memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan pembiayaan bagi UMKM. Pembiayaan syariah diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala pembiayaan yang dialami oleh UMKM, mengingat prinsip-prinsip syariah yang lebih fleksibel dan berbasis pada kemitraan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS HIK Parahyangan terhadap peningkatan pendapatan nasabah UMKM di Kabupaten Cirebon.

Efektivitas adalah penilaian terhadap sejauh mana suatu upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan evaluasi output yang dihasilkan dalam konteks tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas mencerminkan seberapa baik output, kebijakan, dan prosedur organisasi berkontribusi terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dengan kata lain, ketika sebuah organisasi berhasil mencapai tujuannya, itu menandakan bahwa organisasi tersebut beroperasi secara efektif.

Meskipun secara normatif pembiayaan syariah yang disalurkan oleh BPRS HIK Parahyangan dirancang untuk mendukung pengembangan UMKM melalui prinsip kemitraan dan keadilan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hasil pembiayaan yang diterima oleh nasabah belum sepenuhnya seragam. Sebagian nasabah mengalami peningkatan pendapatan dan pengembangan usaha, sementara sebagian lainnya belum merasakan dampak yang signifikan terhadap pendapatan

usahanya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal pembiayaan syariah dan hasil empiris yang dicapai di tingkat nasabah UMKM.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek akses pembiayaan, jumlah penyaluran dana, dan jenis akad yang digunakan, namun masih terbatas kajian yang secara spesifik mengukur efektivitas pembiayaan UMKM berdasarkan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan nasabah, khususnya pada konteks Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di tingkat lokal. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menempatkan keberhasilan pembiayaan dari sudut pandang lembaga keuangan, seperti tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan, tanpa mengkaji secara mendalam sejauh mana pembiayaan tersebut benar-benar mampu meningkatkan kinerja ekonomi usaha nasabah.

Di sisi lain, fenomena empiris menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana atau skema akad yang digunakan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal nasabah, seperti karakter, kedisiplinan, dan kemampuan pengelolaan usaha, serta faktor eksternal berupa pendampingan, kualitas pelayanan, dan kondisi lingkungan usaha. Namun, keterkaitan antara faktor-faktor tersebut dengan tingkat efektivitas pembiayaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan nasabah belum banyak dianalisis secara komprehensif dalam konteks BPRS HIK Parahyangan.

Berdasarkan kesenjangan antara harapan normatif pembiayaan syariah dan realitas empiris di lapangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana proses pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan, sejauh mana efektivitas pembiayaan UMKM dalam meningkatkan pendapatan nasabah, serta faktor internal dan eksternal apa saja yang memengaruhi efektivitas pembiayaan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat pemahaman mengenai efektivitas pembiayaan UMKM pada lembaga keuangan syariah, sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan pembiayaan dan pendampingan usaha di BPRS HIK Parahyangan. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan adanya celah antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan pembiayaan oleh BPRS, baik dari segi efektivitas maupun efisiensi. Efektivitas

dalam konteks ini berkaitan dengan sejauh mana pembiayaan yang diberikan oleh BPRS mampu meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan nasabah.

Dengan demikian, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas pembiayaan UMKM oleh BPRS HIK Parahyangan di Kabupaten Cirebon. Evaluasi ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi nasabah, mengevaluasi dampak pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan mereka, serta menggali potensi perbaikan dari sisi lembaga keuangan itu sendiri.

Penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas pembiayaan UMKM yang diberikan oleh BPRS HIK Parahyangan terhadap peningkatan pendapatan nasabah di Kabupaten Cirebon. Efektivitas dalam konteks ini diukur dari sejauh mana pembiayaan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan nasabah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori serta praktik pembiayaan syariah, khususnya di sektor UMKM. Selain itu, hasil penelitian juga dapat memberikan masukan bagi BPRS HIK Parahyangan dalam meningkatkan kualitas layanan pembiayaan mereka, serta sebagai bahan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan melalui sistem keuangan syariah yang inklusif dan produktif.

Pentingnya penelitian ini didasari oleh beberapa alasan. Pertama, meskipun kontribusi UMKM terhadap perekonomian sangat besar, literatur mengenai efektivitas dan pembiayaan UMKM khususnya oleh lembaga keuangan syariah seperti BPRS masih terbatas. Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi BPRS HIK Parahyangan dalam meningkatkan layanan pembiayaan mereka sehingga lebih berdampak positif bagi nasabah. Ketiga, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam mendukung perkembangan UMKM melalui akses pembiayaan yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik mengambil judul **“Efektivitas Pembiayaan UMKM Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah pada BPRS HIK di Sumber, Kabupaten Cirebon.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Kesenjangan antara peran UMKM dan akses pembiayaan BPRS HIK Parahyangan.
2. Tantangan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
3. Fenomena permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan BPRS HIK Parahyangan
4. Keterbatasan studi efektifitas pembiayaan Syariah BPRS HIK Parahyangan.
5. Hambatan akses kredit konvensional bagi UMKM.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan, maka Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas pembiayaan UMKM oleh BPRS HIK Parahyangan dalam meningkatkan pendapatan nasabah.
2. Efektivitas proses pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan.
3. faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan di BPRS HIK Parahyangan.
4. Penelitian dibatasi pada nasabah BPRS HIK Parahyangan Sumber

D. Perumusan Permasalahan

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan?
2. Bagaimana Efektivitas pembiayaan UMKM oleh BPRS HIK Parahyangan dalam meningkatkan pendapatan nasabah?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas pembiayaan UMKM yang diberikan oleh BPRS HIK Parahyangan terhadap peningkatan pendapatan nasabah di Kabupaten Cirebon.
2. Mengevaluasi efektivitas proses pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan.

3. Mengidentifikasi factor internal dan factor eksternal terhadap efektivitas pembiayaan yang disalurkan di BPRS HIK Parahyangan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian tentang bagaimana pembiayaan UMKM Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di Kabupaten Cirebon dapat menjadi bahan yang berharga bagi penelitian lain dengan fokus yang serupa atau relevan. Harapannya, hal ini bisa memberikan sumbangan penting bagi pengembangan sistem pembiayaan perbankan syariah.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama menempuh studi pendidikan ekonomi ke dalam karya nyata. Selain itu, peneliti dapat mengetahui prosedur Efektivitas Pembiayaan UMKM Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah di Kabupaten Cirebon serta peluang dan hambatan yang dihadapinya.

- b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah agar lebih memberikan perhatian khusus terkait pembiayaan pada UMKM di Indonesia pada umumnya, dan di daerah Kabupaten Cirebon. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon melalui peningkatan akses pembiayaan yang efektif dan efisien.

- c. Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi kepada perbankan syariah pada umumnya, dan BPR Syariah di Kabupaten Cirebon pada khususnya untuk meningkatkan program pembiayaan pada UMKM.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah penulisan skripsi ini penulis membagi skripsi ini menjadi lima bagian pokok yang merupakan rangkaian bab demi bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, Metode penelitian, Sistematika penulisan, dan Rencana waktu penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori tentang Efektivitas, Pembiayaan Agribisnis, BPRS dan ringkasan dari penelitian terdahulu yang relevan / hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian meliputi: jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan mengenai analisa yang telah dilakukan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.